

## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya disimpulkan bahwa penyebab PBB tidak dapat menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan Junta Militer di Myanmar karena lemahnya tekanan PBB karena pecahnya Dewan Keamanan serta kuatnya rejim militer.

Myanmar merupakan salah satu negara yang banyak melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh junta militer, penguasa Myanmar. Walaupun PBB berkewajiban untuk menegakkan HAM di Myanmar namun pada kenyataannya pelanggaran HAM di Myanmar terus berlangsung hingga saat ini.

Junta Militer mulai berkuasa di Myanmar pada tahun 1962. Junta Militer saat itu melakukan kudeta sehingga berhasil merebut kekuasaan pemerintah Burma saat itu. Hingga kini (tahun 2010) Junta Militer masih berkuasa di Myanmar. Pelanggaran yang dilakukan oleh Junta Militer adalah melakukan tindak kekerasan, mengekang kebebasan mengungkapkan ide, serta Mengekang kebebasan mendapatkan informasi. Pada 1988, terjadi gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan Junta Militer. Gelombang demonstrasi ini berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. Pada saat aksi demonstrasi terjadi, sebanyak lebih dari 3000 orang terbunuh. Ini merupakan bukti nyata bahwa Junta Militer telah melakukan pelanggaran HAM di Myanmar.

Kuatnya rezim junta militer juga terlihat dari tindakan junta pada 1989, dimana junta militer tanpa tanpa persetujuan rakyat Burma (yang semula bernama Union Burma) mengubah nama negeri ini menjadi Myanmar. Arogansi Junta Militer Myanmar nampak pada Tatmadaw, sebutan militer Myanmar, selalu mengklaim dirinya sebagai institusi yang paling berjasa dalam memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan.

Menonjolkan prestasinya menyelamatkan negara, yang nyaris tercabik-cabik oleh pemberontakan Partai komunis Burma dan lebih dari 50 kelompok etnis sejak tahun 1950an. Di sisi lain sipil di nilai gagal, tidak pantas memimpin negara, karena konflik di tingkat elit politik.

Dukungan Cina terhadap Junta Militer adalah di bidang ekonomi, militer, serta politik. Dukungan politik merupakan dukungan yang sangat berperan dalam menyebabkan PBB tidak dapat menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar. PBB mengalami kegagalan dalam menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar. Bukti nyatanya adalah PBB tidak mampu mengambil tindakan apapun saat pengacara Cina yang mendukung HAM di Myanmar mendapatkan tekanan dari pemerintah Cina. Selain itu, PBB juga tidak mampu berbuat apapun saat pemerintah Myanmar mengusir ribuan kaum muslimin (suku Rohingya) dari Myanmar. Dan yang terakhir adalah tidak efektifnya Resolusi PBB dikarenakan pecahnya Dewan Keamanan.

Setelah melakukan penelitian ini, penulis memahami bahwa suatu organisasi internasional seperti PBB pada kenyataannya mengalami kesulitan dalam menangani

adanya pelanggaran HAM yang ada pada suatu negara. Hal ini karena faktor internal

maupun eksternal yang ada. Dengan demikian, HAM adalah hak asasi manusia yang